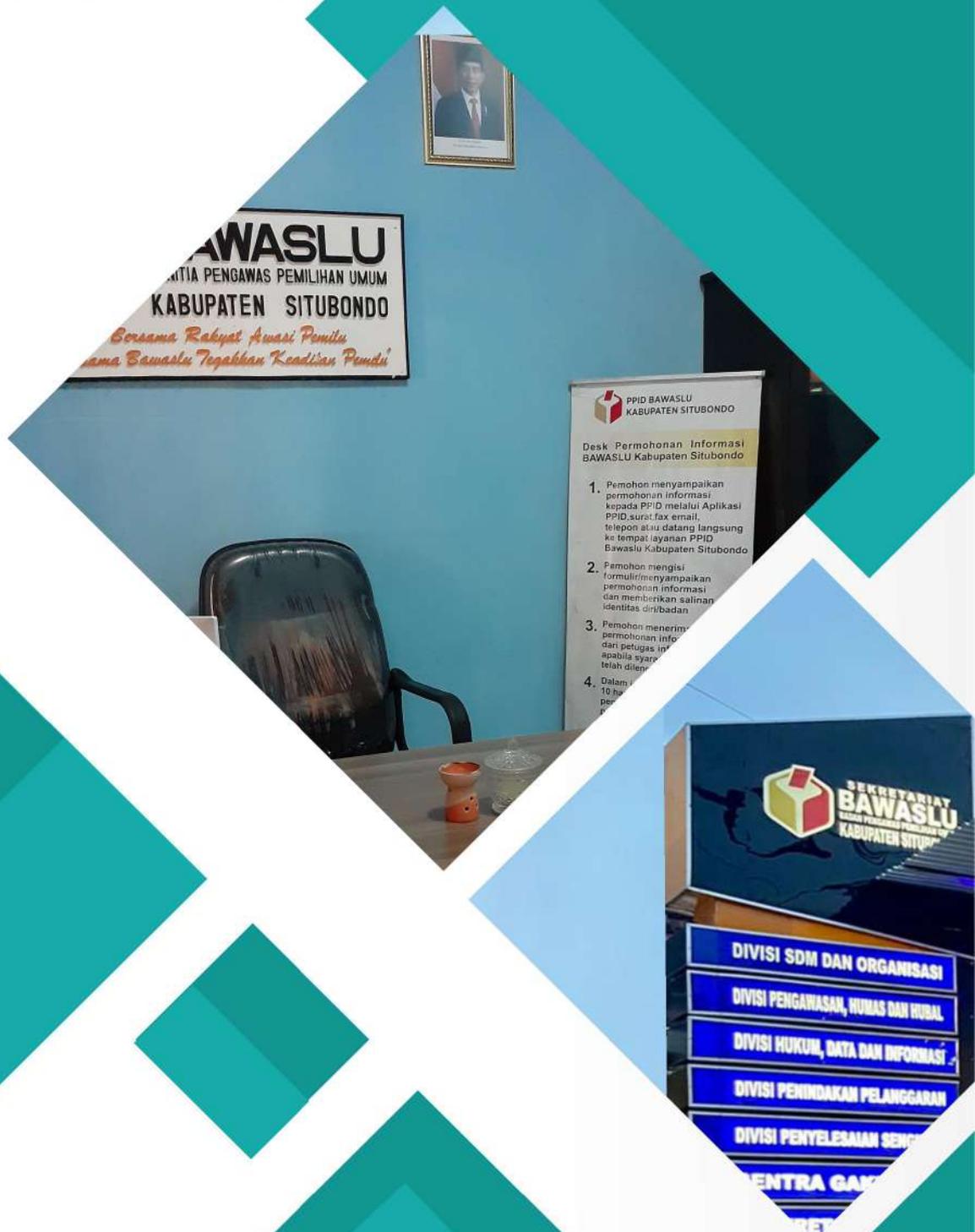


LAPORAN AKHIR PPID TAHUN 2021



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Jl. Madura No. 17 Mimbaan Situbondo 68322



BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO



BAWASLU_SITUBONDO



BAWASLU_STBD



SITUBONDO.BAWASLU.GO.ID



BAWASLU.KAB.SITUBONDO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Tuhan Alam Semesta atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya terhadap keluarga besar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya pada perjalanan proses demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga Negara atau lembaga Publik yang mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai bentuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel,

Laporan akhir ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021. Laporan akhir ini merupakan ikhtiar Bawaslu Situbondo dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga negara dan pemerintah. Namun secara internal, laporan ini akan sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas segala bimbingan dan arahnya hingga laporan ini bisa dirampungkan. Terima kasih pula kepada Ketua dan Anggota beserta seluruh Staf Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai mitra kerja dan supporting system sehingga kita bisa membangun sinergisitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Grafik	4
Daftar Gambar	5
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
a. Struktur Organisasi	6
b. Program PPID	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
a. Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	8
b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Situbondo	10
c. Pelaksanaan Program PPID	13
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
a. Jumlah Permohonan Informasi	14
b. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi	15
c. Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan	15
d. Permintaan Informasi Publik yang ditolak	15
e. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	16
BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	17
a. Informasi yang di Publikasikan	17
b. Penyebaran Informasi Publik	17
BAB V RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	19
BAB VI RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	20
BAB VII REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	21
a. Kendala kendala yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam Melayani Keterbukaan Informasi Publik	21
b. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .	21
c. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	21
BAB VIII PENUTUP.....	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR TABEL

1. Susunan Personalia PPID Bawaslu Situbondo Tahun 2021	10
2. Statistik Sarana Penyebaran Informasi	17

DAFTAR GRAFIK

1. Jumlah Permohonan Informasi.....14
2. Jenis Permohonan Informasi15

DAFTAR GAMBAR

1. Tampilan WEB PPID	9
----------------------------	---

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

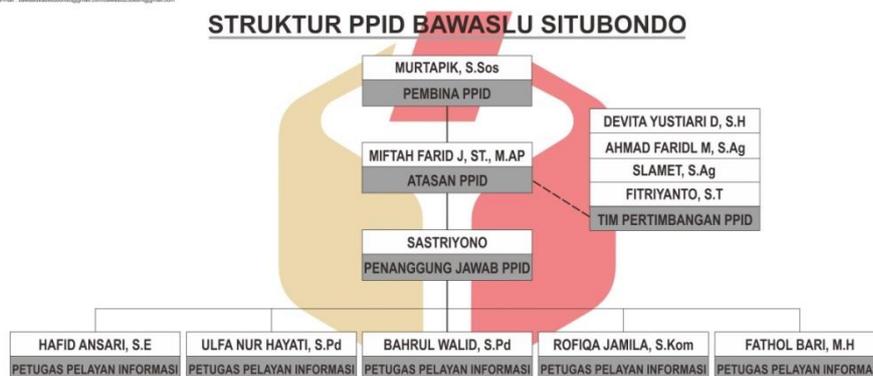
Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 014.1/K.JI-25/HM.00/IX/2020 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 1. Struktur Organisasi



Sumber : Data Bawaslu Situbondo

B. Program PPID

Rencana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo.
2. Rapat internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilakukan secara berkala.
3. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama satu tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Situbondo memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP. Pelayanan Informasi di meja Informasi terdapat beberapa fasilitas yang sudah disediakan :

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima
- Daftar informasi publik
- Jadwal pelayanan permohonan informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang biasa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka

menjalkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a) Website

Dengan mengakses website PPID <http://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 2. Tampilan Web PPID



Sumber : Data Bawaslu Situbondo

b) Whatsapp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo telah memiliki Nomer WhatsApp +6281939727993. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten yang sudah tersedia di dalam dasbor PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo. Pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih

dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo

c) E-mail

Selain Website dan WhatsApp pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan informasinya. Adapun e-mail PPID bawaslusitubondoppid@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Situbondo

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 014.1/K.JI-25/HM.00/IX/2020 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, antara lain :

Tabel 1. Susunan Personalia PPID Bawaslu Situbondo Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1	Murtapik, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pembina
2	Devita Yustiari Dewi, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Tim Pertimbangan
3	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Tim Pertimbangan
4	Slamet, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Tim Pertimbangan
5	Fitriyanto, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Tim Pertimbangan
6	Miftah Farid Jamaluddin, ST., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo	Atasab PPID
7	Sastriyono	Staf Subbagian Pengawasan (PNS)	PPID
8	Ulfa Nur Hayati, S.Pd	Staf Subbagian Hukum, Humas, Data & Informasi (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi

9	Rofiqa Jamila, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
10	Bahrul Walid, S.Pd	Staf Subbagian Pengawasan (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi
11	Fathol Bari, SH Hafid Ansari, SE	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPNPN)	Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik
3. Atasan PPID bertugas
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi public;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
4. PPID bertugas
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan

- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan

C. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan Rencana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo.
2. Rapat internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilakukan secara berkala dengan seluruh jajaran struktural PPID.
3. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama satu tahun.

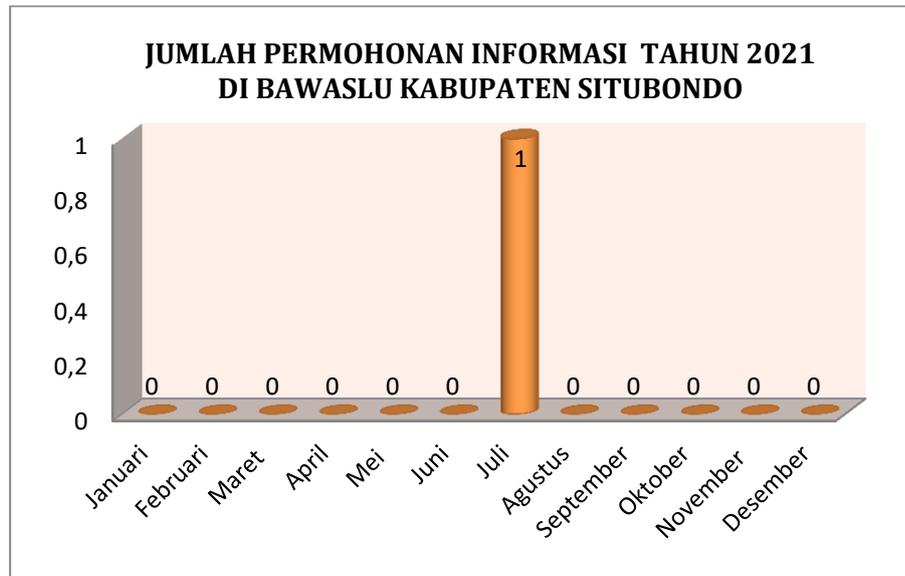
Seluruh pelaksanaan kegiatan internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak menggunakan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 1 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi

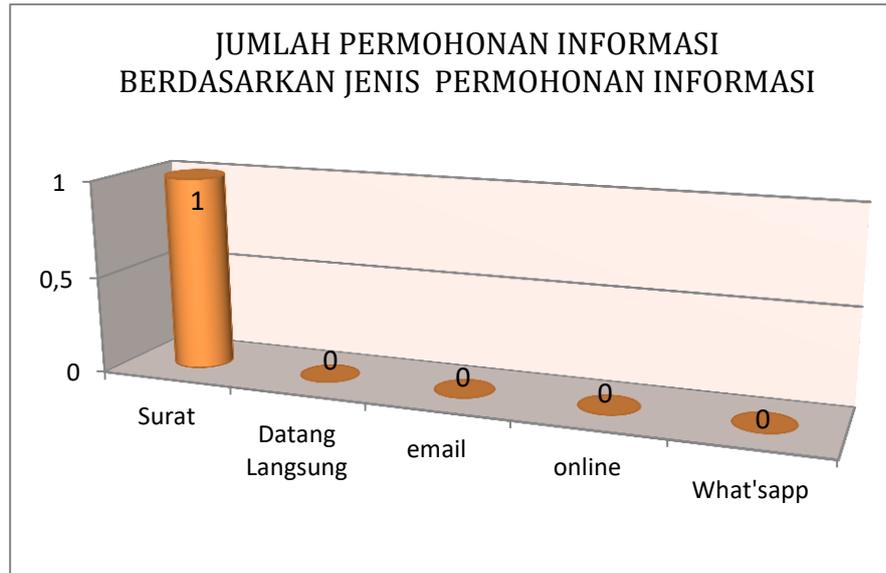


Sumber : Data Bawaslu Situbondo

Latar belakang pemohon informasi dari 1 pemohon adalah Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, dengan tujuan permohonan informasi tersebut sebagai bahan skripsi.

Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi.

Grafik 2. Jenis Permohonan Informasi



Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Situbondo

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 dilakukan selama 1-2 hari. Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam memenuhi permintaan data pemohon informasi diperlukan waktu selama 2 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2021, Bawaslu Situbondo memiliki 1 permohonan informasi. Dimana dari 1 permohonan informasi tersebut dikabulkan.

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Situbondo belum ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Situbondo, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Dapat mendatangi langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Madura No.17 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>.
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What'sApp* (WA) di nomor +6281939727993.
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : bawaslusitubondoppid@gmail.com

BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://situbondo.bawaslu.go.id>
- b) Website PPID : <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : https://instagram.com/bawaslu_situbondo
- d) Facebook : <https://web.facebook.com/bawaslukabstbd>
- e) Twitter : https://www.instagram.com/bawaslu_stbd
- f) You Tube : <https://www.youtube.com/channel/UCj55UQia09ru6lr3RDxd43g>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk penunjang keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik sarana penyebaran informasi

No	Jenis Akun	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/Followers/Subscriber
1	Website Lembaga	https://situbondo.bawaslu.go.id	586
2	Website PPID	https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id	
3	Instagram	https://instagram.com/bawaslu_situbondo	6615
4	Facebook:	https://web.facebook.com/bawasluk	2714

		abstbd	
5	Twitter	https://www.twitter.com/bawaslu_s_tbd	207
6	You Tube	https://www.youtube.com/channel/UCj55UQia09ru6lr3RDxd43g	18

Sumber : Data Bawaslu Situbondo

BAB V
RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selama tahun 2021 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

BAB VI
RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak pernah menangani sengketa informasi. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo akan selalu memberikan informasi yang akurat dan tepat.

BAB VII

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala kendala yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam Melayani Keterbukaan Informasi Publik

a. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

b. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. di Bawaslu Kabupaten Situbondo, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian divisi kehumasan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Situbondo terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Kegiatan PPID Kab/Kota dapat dianggarkan dalam APBN Bawaslu
2. Monitoring secara berkala dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
4. Membuat E-PPID aplikasi berbasis android

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
2. Berkoordinasi dengan bagian/subbagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan akhir kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo selama Tahun 2021. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Situbondo. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepan pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Situbondo memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam memberikan Informasi terkait kelembagaan.

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 BAWASLU SITUBONDO

INFORMASI BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu							
1	Alamat Lengkap	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
2	Visi dan Misi	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
3	Struktur Organisasi	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
5	Profil Singkat Kepala Sekretariat	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
6	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
7	Informasi Kepegawaian	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
8	Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu							
9	Rencana Strategis 2020	Administrasi	Administrasi	2015		v	Sesuai dengan retensi arsip
10	Pengumuman PPNPN 2020	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
12	Pengumuman Penerimaan Panwascam Pilkada Tahun 2020	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
13	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwascam Pilkada Tahun 2020	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
14	Pengumuman Panwascam Terpilih Tahun 2020	Humas	Humas	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
15	Jumlah Peserta SKPP 2020	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
16	Jumlah Peserta SKPP 2021	Pengawasan	Pengawasan	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip

III. Informasi Mengenai Keuangan							
17	Laporan BMN 2020	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
18	Laporan BMN 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
19	Laporan Keuangan Bawaslu Situbondo	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
20	DIPA 2017	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
21	DIPA 2018	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
22	DIPA 2019	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
23	DIPA 2020	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
24	DIPA 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
25	LHKPN 2019	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
26	LHKPN 2020	Administrasi	Administrasi	2021\		v	Sesuai dengan retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian							
27	Informasi Kepegawaian 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
28	Pedoman Pengelola Organisasi	Administrasi	Administrasi			v	Sesuai dengan retensi arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
29	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	Humas	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
VI. Informasi Hasil Penelitian							
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
VII. Buku Bawaslu Jawa Timur							
30	Mereka Yang Rentan dan Butuh Pengakuan	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
31	Profil Srikandi Bawaslu di Jawa Timur	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
32	Hasil Pengawasan Pilgub Jatim 2018	Pengawasan	Pengawasan	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
33	Buku Saku Pidana Pungut Hitung Pemilu 2019	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
34	Buku Saku Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip

35	Buku Panduan Mengawasi Kampanye	Pengawasan	Pengawasan	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
36	Kalender Harian Pilkada 2020	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
37	Buku Sejarah Pengawasan Pemilu Di Jawa Timur (1999-2019)	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
38	Modul Input Putusan pada JDIH Bawaslu	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
39	Kompilasi 4 PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
40	Buku Perempuan Yang..	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
41	Kompilasi 3 PKPU Pencalonan Pilkada 2020	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
42	Kompilasi Pengaturan KPU Kampanye Pilkada di Masa Covid	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
43	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
44	Hasil Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
45	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
46	Identifikasi TPS Rawan Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
47	Serial Evaluasi Pilkada 2020 serentak di Indonesia Bawaslu Jawa Timur	Pengawasan	Pengawasan	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
VIII. Buletin							
48	Buletin Demi Pemilu Bawaslu Jatim	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
IX. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
49	SK PPID	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
50	SOP Pelayanan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
51	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
52	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip

53	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
54	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
55	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
56	SOP Penyusunan DIP	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
X. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu							
57	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
58	Alur Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
59	Alur Tindak Lanjut Informasi Awal	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
60	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
61	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
62	Modul SKPP 2020	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
63	Panduan Pojok Pengawasan	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
XI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan							
64	Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang-undang Pemilu	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
65	Analisis Perbawaslu Gakkumdu	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
66	Daftar Peraturan Bawaslu Tahun 2017 yang Tengah Disusun	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
67	Daftar Peraturan Bawaslu yang telah Diundangkan	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
68	Pedoman Penilaian PPNPNS	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
69	Pedoman Tata Tertib Kepegawaian	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
XIII. Dokumen Kontrak							
INFORMASI SERTA MERTA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	

			Penerbitan Informasi		Cetak	Online	
XIV. Putusan Sengketa Proses Pemilu							
XV. Putusan							

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 BAWASLU SITUBONDO

INFORMASI BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu							
1	Alamat Lengkap	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
2	Visi dan Misi	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
3	Struktur Organisasi	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
5	Profil Singkat Kepala Sekretariat	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
6	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
7	Informasi Kepegawaian	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
8	Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu							
9	Rencana Strategis 2020	Administrasi	Administrasi	2015		v	Sesuai dengan retensi arsip
10	Pengumuman PPNPN 2020	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
11	Pengumuman PPNPN 2022	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
12	Pengumuman Penerimaan Panwascam Pilkada Tahun 2020	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
13	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwascam Pilkada Tahun 2020	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
14	Pengumuman Panwascam Terpilih Tahun 2020	Humas	Humas	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
15	Jumlah Peserta SKPP 2020	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
16	Jumlah Peserta SKPP 2021	Pengawasan	Pengawasan	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
III. Informasi Mengenai Keuangan							

17	Laporan BMN 2020	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
18	Laporan BMN 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
19	Laporan Keuangan Bawaslu Situbondo	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
20	DIPA 2017	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
21	DIPA 2018	Administrasi	Administrasi	2016		v	Sesuai dengan retensi arsip
22	DIPA 2019	Administrasi	Administrasi	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
23	DIPA 2020	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
24	DIPA 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
25	LHKPN 2019	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
26	LHKPN 2020	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
27	LHKPN 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian							
28	Informasi Kepegawaian 2021	Administrasi	Administrasi	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
29	Pedoman Pengelola Organisasi	Administrasi	Administrasi			v	Sesuai dengan retensi arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
30	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	Humas	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
VI. Informasi Hasil Penelitian							
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
VII. Buku Bawaslu Jawa Timur							
31	Mereka Yang Rentan dan Butuh Pengakuan	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
32	Profil Srikandi Bawaslu di Jawa Timur	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
33	Hasil Pengawasan Pilgub Jatim 2018	Pengawasan	Pengawasan	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
34	Buku Saku Pidana Pungut Hitung Pemilu 2019	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
35	Buku Saku Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip

36	Buku Panduan Mengawasi Kampanye	Pengawasan	Pengawasan	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
37	Kalender Harian Pilkada 2020	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
38	Buku Sejarah Pengawasan Pemilu Di Jawa Timur (1999-2019)	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
39	Modul Input Putusan pada JDJH Bawaslu	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
40	Kompilasi 4 PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
41	Buku Perempuan Yang..	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
42	Kompilasi 3 PKPU Pencalonan Pilkada 2020	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
43	Kompilasi Pengaturan KPU Kampanye Pilkada di Masa Covid	Hukum dan Datin	Hukum dan Datin	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
44	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
45	Hasil Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
46	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
47	Identifikasi TPS Rawan Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
48	Serial Evaluasi Pilkada 2020 serentak di Indonesia Bawaslu Jawa Timur	Pengawasan	Pengawasan	2021		v	Sesuai dengan retensi arsip
VIII. Buletin							
49	Buletin Demi Pemilu Bawaslu Jatim	Humas	Humas	2019		v	Sesuai dengan retensi arsip
IX. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
50	SK PPID Tahun 2020	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
51	SK PPID Tahun 2022	Humas	Humas	2022		v	Sesuai dengan retensi arsip
52	SOP Pelayanan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
53	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip

54	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
55	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
56	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
57	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
58	SOP Penyusunan DIP	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
X. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu							
59	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
60	Alur Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
61	Alur TindakLanjut Informasi Awal	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
62	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
63	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
64	Modul SKPP 2020	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
65	Panduan Pojok Pengawasan	Pengawasan	Pengawasan	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
XI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan							
66	Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang-undang Pemilu	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
67	Analisis Perbawaslu Gakkumdu	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
68	Daftar Peraturan Bawaslu Tahun 2017 yang Tengah Disusun	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
69	Daftar Peraturan Bawaslu yang telah Diundangkan	Humas	Humas	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
70	Pedoman Penilaian PPNPNS	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
71	Pedoman Tata Tertib Kepegawaian	Administrasi	Administrasi	2020		v	Sesuai dengan retensi arsip
XIII. Dokumen Kontrak							
INFORMASI SERTA MERTA							

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
XIV. Putusan Sengketa Proses Pemilu							
XV. Putusan							